



DINAS PERPUSTAKAAN



GESIT

GERAKAN SIKLUS LITERASI

2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**LITERASI UNTUK
KESEJAHTERAAN**

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Alamat : Jalan Alwi Abdul Djali Habibie No. 1 Parepare
<https://perpustakaan.parepare.go.id>

**bangga
melayan
bangsa**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) DINAS PERPUSTAKAAN Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2024.

Laporan Kinerja (LKj) DINAS PERPUSTAKAAN Tahun 2024 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2024-2026, LKj Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2024-2026).

LKj DINAS PERPUSTAKAAN disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2024. Penyusunan LKj DINAS PERPUSTAKAAN Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perpustakaan Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Perpustakaan bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DINAS PERPUSTAKAAN untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj DINAS PERPUSTAKAAN Tahun 2024 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di DINAS PERPUSTAKAAN Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama DINAS PERPUSTAKAAN pada tahun 2024, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas DINAS PERPUSTAKAAN Tahun 2024 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 4 (*empat*) indikator kinerja utama, terdapat 2 (dua) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj DINAS PERPUSTAKAAN Tahun 2024 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Terima kasih

Parepare, 1 Februari 2025
Kepala Dinas Perpustakaan

Drs. H. AHMAD, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja DINAS PERPUSTAKAAN melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan DINAS PERPUSTAKAAN untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi DINAS PERPUSTAKAAN untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj DINAS PERPUSTAKAAN Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2024 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perpustakaan.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2024 telah berhasil dicapai.

IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih besar dari target yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu : Jumlah Koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah, Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku, Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan Sedangkan indikator kinerja sasaran yang lainnya realisasinya dibawah 100% yaitu : Jumlah Kunjungan orang ke perpustakaan per tahun, Jumlah Pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi DINAS PERPUSTAKAAN ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait dengan

Rendahnya minat membaca buku, karena sebagian besar masyarakat lebih memilih *gadget* dan internet dibandingkan dengan buku, Kurangnya tenaga pustakawan, Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan koleksi perpustakaan yang memiliki nilai sejarah sehingga penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan belum optimal, Belum terlaksananya tata kelola arsip yang sesuai pedoman tata kearsipan, Belum adanya tenaga khusus arsiparis di tiap OPD yang khusus menangani penataan arsip

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi DINAS PERPUSTAKAAN di lingkungan pemerintah KOTA PAREPARE dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.4 Isu Strategis	4
1.5 Struktur Organisasi	5
1.6 Komposisi SDM Organisasi	6
1.7 Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis	8
2.1.1 Tujuan dan Indikator Kinerja	8
2.1.2 Sasaran dan Indikator Kinerja	9
2.1.3 Program untuk Pencapaian Sasaran	10
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2024	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	14
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2024	15
3.1.4 Perbandingan Capaian Kinerja	18
3.1.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	20
3.2 Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	24
LAMPIRAN	25
Daftar Tabel	
Tabel 1.1 Jumlah Aparatur berdasarkan pendidikan	6
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja	8
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja	9
Tabel 2.3 Program untuk pencapaian sasaran	10
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan Tahun 2024	11
Tabel 2.5 IKU Dinas Perpustakaan	11
Tabel 2.6 Rencana Belanja Dinas Perpustakaan Tahun 2024	12
Tabel 2.7 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2024	12
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	15
Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran	15
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran	16
Tabel 3.4 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2	16

Tabel 3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 2	17
Tabel 3.6	Capaian INdikator Sasaran 3	18
Tabel 3.7	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3	19
Tabel 3.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 3	19

Daftar Gambar

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan	6
Gambar 2	Proses Pengolahan Arsip	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perpustakaan

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Perpustakaan LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2019, LKj tingkat OPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Perpustakaan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Perpustakaan Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan yang termuat didalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan, yang menjadi tindaklanjut atas ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam Struktur Organisasi, Dinas Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Parepare melalui Sekretaris Daerah Kota Parepare, dengan tugas pokok dan fungsi :

1. Tugas Pokok

Merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina dan menyelenggarakan pelaksanaan urusan bidang pengolahan, layanan, pelestarian bahan perpustakaan, bidang pengembangan, pembudayaan kegemaran membaca dan urusan bidang penyelenggaraan membaca dan urusan bidang penyelenggaraan kearsipan.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perpustakaan Kota Parepare mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan, layanan, dan pelestarian bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan, pengembangan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca dan penyelenggaraan kearsipan
- b. pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Rincian Tugas

Rincian Tugas Dinas Perpustakaan sebagai berikut :

- a. merumuskan rencana strategik dan program kerja dinas yang sesuai dengan visi dan misi kota Parepare;
- b. menyusun program kegiatan di bidang pengolahan layanan, pelestarian bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca dan penyelenggaraan kearsipan;
- c. mengatur, mendistribusikan, mengkoordinasikan, mengkoordinasikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan ;
- e. melaksanakan pengembangan koleksi, layanan, otomasi, kerjasama perpustakaan dan pelestarian bahan perpustakaan;
- f. melaksanakan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- h. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan pedoman pengolahan, layanan, pelestarian bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca serta penyelenggaraan kearsipan;
- i. menyelenggarakan pembinaan pustakawan dan pengelola perpustakaan;
- j. menyelenggarakan pembinaan kearsipan;
- k. melaksanakan pengawasan dan pengelolaan kearsipan;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan, administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;

1.4 ISU STRATEGIS

Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan telaahan Renstra Perpustakaan dan Arsip Nasional, Renstra Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dan memperhatikan visi misi Kota Parepare 2018-2024 serta faktor-faktor penghambat dan pendorong yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Perpustakaan Kota Parepare dalam lima tahun kedepan, penentuan isu-isu strategis Dinas Perpustakaan Kota Parepare yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan kualitas dan kuantitas aparatur teknis bidang perpustakaan dan kearsipan yang memadai;
2. Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan fungsi pelayanan sampai ke tingkat kelurahan dan minat masyarakat dalam pemanfaatan perpustakaan dan arsip daerah;
3. Adanya Digitalisasi Pengarsipan dan Perpustakaan Digital.
4. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pengembangan perpustakaan di daerah.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan Kota Parepare tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Daerah Daerah Kota Parepare Nomor 127) dan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas Perpustakaan Kota Parepare dibantu oleh :

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penatausahaan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan meliputi administrasi umum, kepegawaian, penyusunan dan perencanaan program dan kegiatan serta keuangan, dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas. Selanjutnya Sekretaris membawahi 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, yakni :

a. **Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kehumasan, dokumentasi, perlengkapan dan administrasi surat menyurat.

b. **Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.**

Kepala Subbagian, mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan subbagian, membantu pelaksanaan tugas sekretaris, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta membuat laporan secara berkala.

2. Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.

Mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, member petunjuk/arahan, dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pelaksanaan pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan.

3. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Bertugas memimpin, mengkoordinasikan, member petunjuk/arahan dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca.

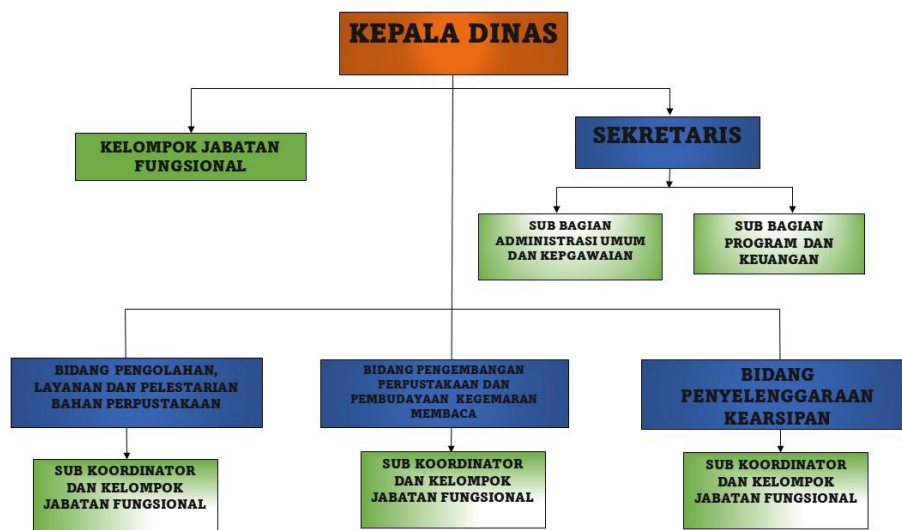
4. Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan

Mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas memimpin, mengkoordinasikan, member petunjuk/arahan dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perpustakaan Sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas, maka pada masing-masing kelompok jabatan fungsional dapat membentuk sub coordinator. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok tugas sub substansi.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan Kota Parepare



1.6 KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Sumber daya aparatur pada Dinas Perpustakaan Kota Parepare yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Parepare, kemudian berdasarkan Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Daerah Daerah Kota Parepare Nomor 127) dan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

Dinas Perpustakaan Kota Parepare memiliki 26 (dua puluh enam) Aparatur Sipil Negara terdiri dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Aparatur berdasarkan pendidikan, pangkat, dan eselon
Tahun 2024.

Pendidikan		Pangkat		Eselon		
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	
S2	11 orang	Pembina Utama Muda	1 orang	II – B	Laki-laki	Wanita
S1	12 orang	Pembina Tk 1	1 orang	III – A	1 orang	-
D3	2 orang	Pembina	8 orang	III – B	3 orang	-
D2	1 orang	Penata Tk I	8 orang	IV – A	1 orang	1 orang
SLTA	- orang	Penata	3 orang	Fungsional Tertentu	5 orang	4 orang
		Penata Muda Tk. I	4 orang	Fung. Umum	3 orang	7 orang
		Penata Muda	0 orang			
		Pengatur	1 orang			
Jumlah	26 Orang	Jumlah	26 Orang	Jumlah	11 orang	15 Orang

1.7 INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan, Dinas Perpustakaan Kota Parepare, pada Tahun 2024 telah dicanangkan 1 (satu) inovasi yang menunjang pencapaian Kinerja Dinas Perpustakaan yakni :

1. Gerakan Siklus Literasi (Gesit) merupakan inovasi dalam rangka menjawab rentetan permasalahan di Perpustakaan Sekolah yang perannya yang belum optimal dalam meningkatkan kreativitas peserta didik dalam mengembangkan potensinya, GESIT memuat tiga unsur utama, yakni membaca, memahami dan mewujudkan. Melalui Inovasi ini perpustakaan sekolah mendesain sebuah Gerakan yang tujuannya pada tiga aspek utama di atas, Inovasi ini berpotensi menstimulus kreatifitas peserta didik untuk tidak sekedar mengeja bait demi bait teks bacaan, tapi juga berupaya memahami isinya dan puncaknya dari Gerakan ini akan dibuatkan bentuk karya nyata berupa pameran atau pementasan sebagai ruang ekspresi dan apresiasi atas capaian peserta didik.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN

2.1.1 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Upaya mengimplementasikan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Parepare 2024-2026 dan memperhatikan permasalahan-permasalahan pokok bidang Perpustakaan dan Kearsipan, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Parepare merumuskan Tujuan Pertama ke I RPD yakni “Meningkatkan Daya Saing Masyarakat” dan Sasaran ke 1 yakni “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia” ke dalam Tujuan Dinas Perpustakaan Kota Parepare Tahun 2024 sebagai berikut:

Tujuan Dinas Perpustakaan Tahun 2024-2026 adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan
2. Meningkatkan minat baca masyarakat dan budaya kegemaran membaca
3. Menyelenggarakan Pengelolaan Arsip secara baku

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan

No	Tujuan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2023	Target Akhir Renstra 2026
1	2	4	5	6
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan	Nilai Predikat SAKIP oleh APIP	BB	BB
2	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat dan Budaya Kegemaran Membaca	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	92,46	96,00

No	Tujuan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2023	Target Akhir Renstra 2026
		Tingkat Kegemaran Membaca	61,27 (Nilai)	79 (Nilai)
3	Menyelenggarakan pengelolaan arsip secara baku	Persentase SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku	30 persen	75 persen

2.1.2 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

- Tujuan 1** : “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan”
 Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan
- Tujuan 2** : “Meningkatkan Minat Baca Masyarakat dan Budaya Gemar Membaca”
 Sasaran : Meningkatnya Indeks Literasi Pembangunan Masyarakat
- Tujuan 3** : “Menerapkan pengarsipan secara baku kepada SKPD se-Kota Parepare”
 Sasaran : Terselenggaranya pengelolaan kearsipan secara baku

Tabel 2.2
 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan	Nilai Predikat SAKIP	BB	A
2	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat dan Budaya Kegemaran Membaca	Meningkatnya Indeks Literasi Pembangunan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi	92,46	96
		Meningkatnya Nilai Kegemaran Membaca	Tingkat Kegemaran Membaca	61,27	79
3	Menyelenggarakan pengelolaan arsip secara baku	Terselenggaranya pengelolaan kearsipan secara baku	Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	30 persen	75 persen

2.1.3 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Meningkatnya Indeks Literasi Pembangunan Masyarakat	Program pembinaan perpustakaan
Terselenggaranya penerapan administrasi kearsipan secara baku kepada SKPD	Program pengelolaan arsip
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
	Program Perizinan Penggunaan Arsip

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2024, IKU. Dinas Perpustakaan telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan	Nilai Predikat SAKIP oleh APIP	Nilai	BB
2	Meningkatnya Indeks Literasi Pembangunan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	93
3	Meningkatnya Nilai Kegemaran Membaca	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	75
4	Terselenggaranya pengelolaan kearsipan secara baku	Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	persen	50

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Perpustakaan telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.5 IKU Dinas Perpustakaan

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	SATUAN	Sumber data	Formula
Meningkatnya Indeks Literasi Pembangunan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Skor	Bidang Pengolahan, Layanan Dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Jumlah ketujuh Unsur Pembangun Lliterasi Masyarakat dikali 100 dibagi 7
Meningkatnya Nilai Kegemaran Membaca	Tingkat Kegemaran Membaca	Rasio	Bidang Pengembangan Perpustakaan Dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Jumlah dari 0,3 kali dari (Frekuensi Membaca ditambah Durasi Membaca ditambah Jumlah Bacaan) ditambahkan dengan 0,05 kali dari (Frekuensi Akses Internet dan Durasi Akses Internet)
Terselenggaranya pengelolaan kearsipan secara baku	Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	persen	Bidang Pengelenggaraan Arsip	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku dibagi Jumlah keseluruhan SKPD dikali 100%

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 4.454.158.063.- yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara rinci rencana anggaran Belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Rencana Belanja Dinas Perpustakaan TA. 2024

No	Uraian	Rencana(Rp)	%
1	Belanja Operasi - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.297.536.773,- Rp. 3.086.163.063,- Rp. 1.211.373.710,-	96,48
2	Belanja Modal - Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 156.621.290,- Rp. 156.621.290,-	3,52
Jumlah		Rp. 4.454.158.063.-	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2024

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	3.967.018.063	89,06%
Meningkatnya Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	362.140.000	8,13%
	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)		
Terselenggaranya penerapan administrasi kearsipan secara baku kepada SKPD	Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	125.000.000	2,81%
TOTAL		4.454.158.063	100

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp 4.454.158.063.- dengan prosentase anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatkan Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan besaran 8,13 %. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Terselenggaranya penerapan

administrasi kearsipan secara baku kepada SKPD sebesar 2,81 % dari total anggaran Belanja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Perpustakaan Kota Parepare tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Dinas Perpustakaan Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang secara rinci dari capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	?	? %	
2	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	93	94,68	101,81 %	
3	Meningkatnya Tingkat Kegemaran Membaca	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	75	76,87	102,49 %	
4	Terselenggaranya penerapan administrasi kearsipan secara baku	Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	50 persen	47 persen	94 %	

A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perpustakaan Tahun 2024 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan Renstra maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2024 dari Dinas Perpustakaan dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

Sasaran 2: Meningkatnya Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 2 dan 3

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Kinerja Provinsi	Kinerja Nasional 2024
a.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	93	94,68	101,80 %	88,24	73,52
b.	Tingkat Kegemaran Membaca	75	76,87	102,49 %	74,46	72,44

Dari tabel 3.3 diatas dapat dilihat realisasi capaian terget pada tahun 2024 baik pada Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat maupun Tingkat Kegemaran Membaca Nilai yang dicapai Dinas Perpustakaan Kota Parepare lebih tinggi dibandingkan Nilai pada tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 2 dan 3

Tabel 3.4 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.

No	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Kondisi 2024 s/d 2026	% Dari RPJMD	Target 2024
a.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	42,93	92,46	94,68	96	98,63 %	93
b.	Tingkat Kegemaran Membaca	60,37	61,27	76,87	79	97,30 %	75

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Berdasarkan Tabel 3.3 IPLM pada Tahun 2024 sebanyak 94,68 poin lebih dari target yang ditetapkan sebanyak 93 poin atau sekitar 101,80 % capaiannya. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan layanan perpustakaan dan ketercukupan koleksi perpustakaan.

2. Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)

Tingkat Kegemaran Membaca pada tahun 2024 sebanyak 76,87 poin, lebih tinggi dari capaian TGM pada Tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada jumlah frekuensi membaca dan durasi membaca.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 2.

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5=3-4
a.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	101,80	84,97 %	17,7 %
b.	Tingkat Kegemaran Membaca	102,49		
	Rata – rata capaian Kinerja	102,14 %		

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 102,14 %, jika dibandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 84,97 %, maka ada efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran tersebut sebesar 17,7 %

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dari sasaran ini adalah terdiri dari Program Pembinaan Perpustakaan. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 3.5 di atas yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebesar 101,80 %, dan Tingkat Kegemaran Membaca sebesar 102,49 %

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 327.140.000 dan realisasi sebesar Rp. 277.985.510,- atau 84,97 % dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Sasaran ini adalah terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan

(sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar Nasional perpustakaan, Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota, Pengembangan Bahan Pustaka, Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota). Pengembangan Bahan Pustaka, Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca, Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial,)

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan yakni kurangnya tenaga pustakawan baik yang bertugas dilapangan maupun yang bertugas di kantor sehingga pelaksanaan tugas belum bisa maksimal, Ketidaksiapan sarana pada layanan perpustakaan, diantaranya katalog koleksi buku yang disajikan dan sarana komputer yang terintegrasi sebagai piranti utama dalam melaksanakan sirkulasi layanan Perpustakaan dan Kearsipan yang memiliki luas gedung sangat terbatas, membuat penyajian koleksi kurang dapat memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pengunjung, sehingga diharapkan dengan Gedung Layanan Perpustakaan yang baru dapat memenuhi kinerja pada masa mendatang.

Sasaran 3: Terselenggaranya penerapan administrasi kearsipan secara baku kepada SKPD.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran 3

Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terselenggaranya penerapan administrasi kearsipan secara baku kepada SKPD

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
a.	Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	50%	47 %	94 %

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.7. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.

No	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Kondisi 2024 s/d 2026	% Dari RPJMD	Target 2024
a.	Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	32,35 %	47 %	47 %	75%	62,67 %	50%

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku

Berdasarkan tabel 3.7 capaian indikator kinerja sasaran di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran terselenggaranya penerapan administrasi kearsipan secara baku kepada SKPD dengan indikator kinerja persentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku baru 16 SKPD atau 47 % dari total 34 SKPD.

Masih kurangnya tenaga fungsional arsiparis yang kompeten di tiap SKPD, sehingga pengelolaan arsip sepenuhnya belum sesuai dengan standar baku yang telah ditetapkan, perlu ada peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Arsiparis melalui pengangkatan tenaga fungsional arsiparis di tiap SKPD.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 3.

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (3-4)
1	2	3	4	5
a.	Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	94 %	37,06%	56,94 %
	Rata – rata capaian Kinerja	94%		

Jika capaian kinerja pada sasaran di atas dirata-ratakan maka rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah 94 %, jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu 37,06 % ada efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran sebanyak 56,94%.

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dari sasaran ini adalah Pengelolaan Arsip. Program ini bertujuan untuk menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini yaitu Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku dengan capaian sebesar 47 %,

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 125.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 46.333.700- atau 37,06% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Belum seluruhnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Parepare memahami pentingnya tata kelola kearsipan yang sesuai aturan, sehingga kesadaran untuk mengelola arsip sesuai aturan belum memenuhi target.

Sedangkan Adanya tanggapan yang positif dari instansi terkait terhadap penyelamatan dan penataan arsip daerah di OPD, hal ini terlihat dari respon positif mengenai akuisisi arsip in aktif dan banyaknya permintaan pendampingan pengelolaan arsip di masing-masing instansi. Arsip-arsip yang telah diakuisisi tersebut selanjutnya disimpan dalam Depo Arsip Kota Parepare.



Gambar. 2 Proses Pengolahan Arsip In Aktif

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

1. *Realisasi Anggaran*

Realisasi anggaran APBD yang dikelola SKPD Dinas Perpustakaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.756.429.340.- (84,34.%)

a. Belanja Pegawai	Rp. 2.678.585.656 (86,79%)
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 960.483.384 (79,29%)
c. Belanja Modal	<u>Rp. 117.360.300 (74,93%)</u>
Jumlah	Rp. 3.756.429.340.- (84,34.%)

2. *Pemanfaatan Anggaran*

a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja SKPD Dinas Perpustakaan terdiri dari :

1) Belanja Pegawai

Realisasi anggaran belanja pegawai SKPD Dinas Perpustakaan dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.678.585.656 (86,79%) yang diarahkan untuk :

Belanja Gaji Pokok ASN	Rp. 1.498.947.226 (91,96%),,-
Belanja TPP ASN	Rp 670.846.650 (80,02%)

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi anggaran belanja barang dan jasa Dinas Perpustakaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 960.483.384 (79,29%)

3) Belanja Modal

Realisasi belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp. 117.360.300,00 (74,93%) untuk Sub Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota..

3. *Penghargaan Yang Diterima*

Piagam Penghargaan dari Arsip Nasional atas dedikasi Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Perpustakaan Kota Parepare dalam menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui aplikasi SRIKANDI dengan Nomor HM.06/557/2024 tanggal 30 Agustus 2024. (piagam terlampir)

4. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran SKPD Dinas Perpustakaan tahun 2024 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perumusan suatu program dan kegiatan belum direncanakan dengan cermat, tepat waktu dan akurat berdasarkan prioritas kegiatan dan sinkronisasi terhadap kegiatan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi;
2. Keputusan Kepala ANRI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Standar Minimal Gedung dan Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif menyebutkan bahwa suhu udara pada Depo Arsip tidak boleh lebih dari 27⁰C dan kelembaban tidak lebih dari 60%, sedangkan Gedung Depo pada Dinas Perpustakaan Kota Parepare belum memiliki sarana yang memadai untuk memenuhi persyaratan tersebut ;
3. Ketidaksiapan sarana pada layanan perpustakaan, diantaranya katalog koleksi buku yang disajikan dan sarana komputer yang terintegrasi sebagai piranti utama dalam melaksanakan sirkulasi layanan

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Merumuskan berbagai program kegiatan di bidang perpustakaan, kearsipan dan pengembangan melalui wacana yang berkembang di masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan RPJMD. Dengan memprioritaskan program dan kegiatan tersebut untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dan kualitas SDM.
2. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung program dan kegiatan dalam rangka pelayanan perpustakaan dan kearsipan.
3. Menjadikan perpustakaan umum daerah dan depo penyimpanan arsip sebagai bagian dari prioritas pembangunan pemerintah daerah, untuk mewujudkan perpustakaan dan unit kearsipan sebagai sumber informasi yang otentik dan menjadi rujukan pencarian data dan informasi baik bagi aparatur maupun masyarakat.
4. Meningkatkan serta memajukan sumber daya manusia melalui diklat fungsional khusus bagi aparatur melalui diklat fungsional pustakawan dan arsiparis.

Informasi Pencapaian IKU

Berdasarkan IKU yang telah ditetapkan, capaian yang diraih sampai dengan tahun 2024 diuraikan dalam tabel dibawah:

Tabel 3.8 Informasi Capaian IKU

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	94,68	
		Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	76,87	
2	Terselenggaranya penerapan administrasi kearsipan secara baku kepada SKPD	Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	Persen	47	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media Akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dimana Dinas Perpustakaan merupakan salah satu unit organisasi lingkup Pemerintah Kota Parepare yang diwajibkan membuat Laporan Kinerja Tahun 2024 dengan mengacu pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) SKPD Dinas Perpustakaan Tahun 2024-2026.

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pencapaian sasaran Kinerja OPD Dinas Perpustakaan pada Tahun 2024 pada umumnya telah mencapai target yang ditetapkan
- b. Pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dengan melihat indikator *outcome*-nya, diketahui bahwa pencapaian program dan kegiatan tahun 2024 dapat dikatakan baik untuk 4 (empat) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan dengan rata-rata capaian indikator kegiatan sebesar 98,07 % dari target 100%.

Realisasi anggaran dana APBD tahun 2024 yaitu realisasi keuangan sebesar 84,34 % dan realisasi fisik 93.00 %.

Sebagaimana diketahui bahwa Laporan Kinerja merupakan pengukuran kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan (stakeholder), yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya Perpustakaan. LKjIP ini diharapkan pula menjadi dasar kepada kepala unit kerja dan seluruh pejabat dan staf dalam lingkup OPD Dinas Perpustakaan untuk mempersiapkan terselenggaranya *good governance*.



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

Nomor : HM.06/557/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada:

Pemerintah Daerah Kota Parepare

**“Atas Dukungan, Komitmen, Inovasi, dan Konsistensi dalam Mengimplementasikan Aplikasi SRIKANDI
pada Pemerintahan Daerah di Wilayah Pembinaan Kearsipan Daerah I”**

Jakarta, 30 Agustus 2024
Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia,



Imam Gunarto